

BAB I

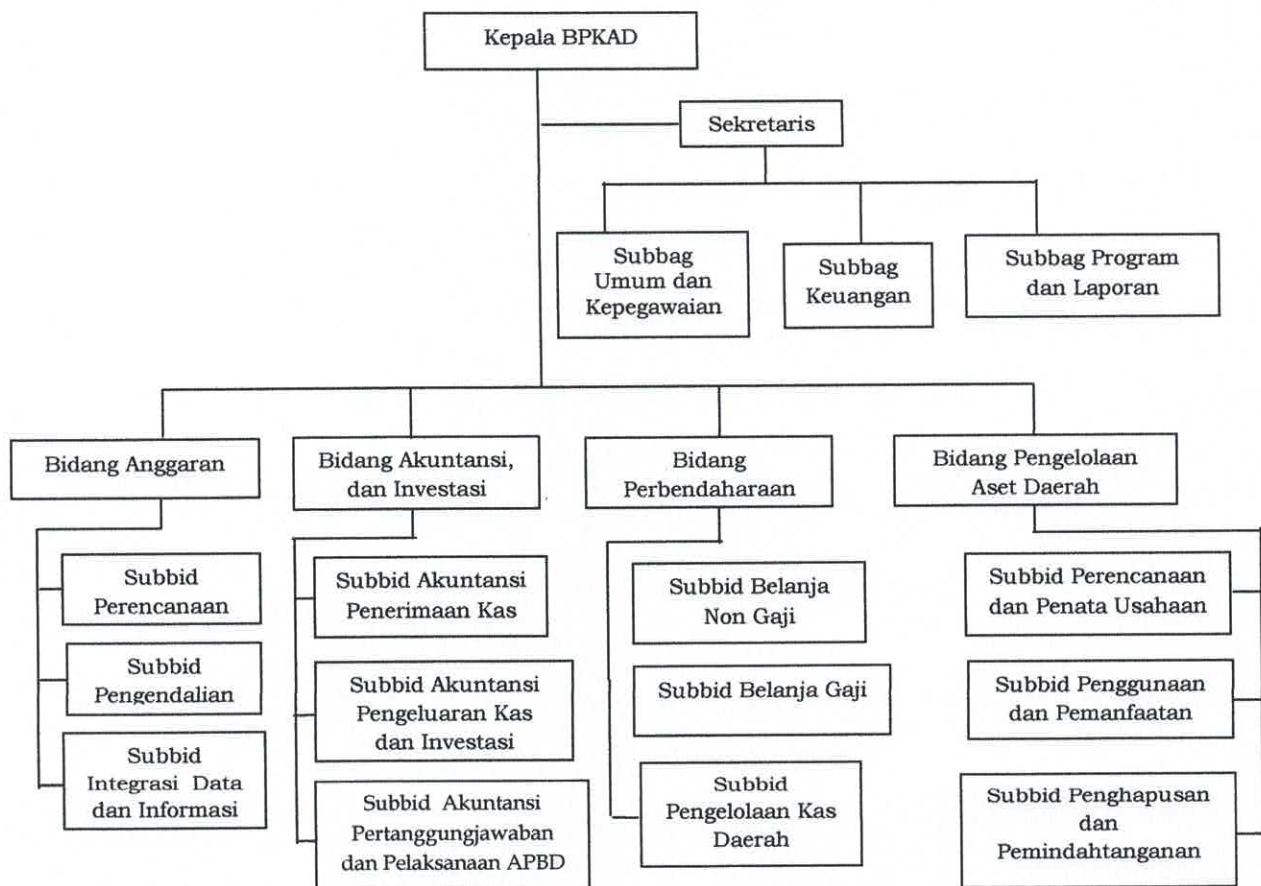
PENDAHULUAN

1.1 PENJELASAN UMUM

a. Peraturan Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Badan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, dengan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:



b. Jumlah Pegawai

Gambaran komposisi pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Pangkat, Golongan Ruang dan Jabatan dan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan
1	LULUK ALIFAH,SE.,MM	Pembina (IV/a)	Pj. Kepala Badan	Pasca Sarjana
2	VEVI RAHMAWATI, S.Sos.,MM	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Pasca Sarjana
3	ANI SUSANTI HARTOYO, SE, AK	Pembina (IV/a)	Kabid Akuntansi dan Investasi Daerah	Sarjana
4	ANDI PANCA W. SE, Ak, MMG	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Pengelolaan Aset Daerah	Pasca Sarjana
5	KHOIRIL ANAM, SE	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Anggaran	Sarjana
6	YURI NUR RAHMAWATI, SE.,MM	Pembina (IV/a)	Kabid Perbendaharaan	Pasca Sarjana
7	SOFIA RAHMAWATI, SE	Penata Tk.I (III/d)	Kasubid Akuntansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sarjana
8	SULISTYONINGSIH, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	Sarjana
9	OON PEWILU SISWANTO, S.Sos	Penata (III/c)	Kasubid Perencanaan Anggaran	Sarjana
10	HERNIK SRIPENI INDRIASIH, SE	Penata Tk.I (III/d)	Kasubid Perencanaan dan Penata Usahaan	Sarjana
11	YUWONO MARHENI, SH	Penata Tk.I (III/d)	Kasubid Belanja Non Gaji	Sarjana

12	UMUL HANIK, SE	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Keuangan	Sarjana
13	SINTA RAHMAWATI, S.STP.,MA	Penata (III/c)	Kasubid Penggunaan dan Pemanfaatan	Sarjana
14	MUNDHORI, Amd	Penata (III/c)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sarjana
15	THOHIER RASPIADO, S.Sos	Penata (III/c)	Kasubid Penghapusan dan Pemindahtanganan	Sarjana
16	ACHMAD HENDRI WIBOWO, SE	Penata (III/c)	Kasubid Akuntansi Penerimaan Kas	Sarjana
17	HIDAYAH, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubid Akuntansi Pengeluaran Kas dan Investasi	Sarjana
18	HILDIANA, SE	Penata (III/c)	Kasubag Program dan Pelaporan	Sarjana
19	TACUK PRASETYO, SE	Penata (III/c)	Staf	Sarjana
20	ABDUL MADJID, S.S.Kom	Penata (III/c)	Staf	Sarjana
21	M.SYAIFUDDIN, S.Sos	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf	Sarjana
22	MUTMAINATUN NIKMAH, S.Sos	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf	Sarjana
23	YOYADA, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf	Sarjana
24	NURUL IFA INAYATIN, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf	Sarjana
25	AGUS DWI NOVIANTO, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana
26	SRI WILUJENG	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana
27	DWI KURNIAWAWATI, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana

28	SULIH PRABAWATI	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana
29	GUGI INDRAYANA	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana
30	ROSE CURNIASARI	Penata muda (III/a)	Staf	Sarjana
31	HERI PURNOMO	Pengatur (II/d)	Staf	Sarjana
32	RENY SULISTYORINI	Pengatur Tk.I (II/c)	Staf	SLTA
33	PUTRA AFIF	Pengatur Tk.I (II/c)	Staf	SLTA
34	SUTIKNO	Pengatur Tk.I (II/c)	Staf	SLTA
35	WAHYUNI	Pengatur Tk.I (II/c)	Staf	SLTA
36	CHUSNI MUBAROK	Pengatur Tk.I (II/c)	Staf	SLTA
37	GILANG PRATOMO WIBOWO, A.Md	Pengatur Tk.I (II/c)	Staf	D3
38	S U M I N T O	Pengatur Muda (II/a)	Staf	SD
39	SITI ASIKAH	–	HONORER	SLTA
40	ABDUL ARIFIN	–	HONORER	SLTA
41	ARIF KRISTIAN TO	–	HONORER	SLTA
42	LAILA NURROHMAN	–	HONORER	SLTA
43	TEGUH DWI SUSANTO	–	HONORER	SLTA
44	ADI WALUYO	–	HONORER	SLTA
45	HANIFA DWI SAFITRI	–	HONORER	SLTA
46	M. KHOIRUS ROZIQIN	–	HONORER	SLTA
47	M. ZUHRI WIJIAN TO	–	HONORER	SLTA
48	M. FAZA NUR HUSAIN	–	HONORER	SLTA
49	AHMAD MUZAKI ZUHDI	–	HONORER	SLTA

50	M. BINTANG PUTRA H.	–	HONORER	SLTA
51	AGUNG BUDI SANTOSO	–	HONORER	SLTA
52	HIKMI AMALITA NUR F.	–	HONORER	SLTA
53	YUSNITA ERMA SAFITRI	–	HONORER	SLTA
54	RAMADHAN SHODIQIN	–	HONORER	SLTA
55	JALALUDIN M. AKBAR	–	HONORER	SLTA
56	SUPARNO	–	HONORER	SLTP

c. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja yang menjadi tugas dan Fungsi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	14.473.912.062,00	137.411.637.875,65	949,37
2	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	175.000.000,00	413.119.757,00	236,06
3	Penerimaan Jasa Giro	12.000.000.000,00	12.279.473.974,08	102,32
4	Pendapatan Bunga	83.000.000.000,00	116.962.293.044,77	140,91
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.500.000.000,00	5.957.747.677,13	79,43
6	Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	7.500.000.000,00	4.039.268.268,10	53,85
7	Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	0,00	34.206.305,32	
8	Pendapatan dari	10.048.000.000,00	6.623.117.174,69	65,91

	Pengembalian			
9	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	138.746.834,00	
10	Lain-lain PAD yang sah lainnya	3.602.191.634,00	3.631.449.184,26	100,81

Realisasi Belanja BPKAD Tahun Anggaran 2020

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah	1.765.675.029,00	1.445.107.484,00	81,84
	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	1.058.658.000,00	948.295.484,00	89,58
	Layanan Administrasi Keuangan	659.027.279,00	468.234.500,00	71,05
	Penyusunan Program dan Laporan	47.989.750,00	28.577.500,00	59,55
2	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	5.612.412.550,00	4.887.121.091,00	87,08
	Perencanaan Anggaran Daerah	631.204.647,00	547.318.176,00	86,71
	Pengelolaan Integrasi Data dan Informasi Anggaran Daerah	1.195.616.663,10	1.063.957.139,00	88,99
	Pengendalian Anggaran Daerah	3.785.591.240,00	3.275.845.776,00	86,53
3	Program Akuntansi dan Investasi	807.319.315,00	518.232.800,00	64,19
	Akuntansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	359.802.345,00	351.488.100,00	70,15
	Akuntansi Pengeluaran Kas	182.994.340,00	177.155.750,00	56,87

	dan Investasi			
	Akuntansi Penerimaan Kas	264.522.630,00	122.098.000,00	61,16
4	Program Pelayanan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	728.154.500,00	650.741.850,00	89,37
	Pelayanan Perbendaharaan Non gaji	405.077.000,00	351.488.100,00	86,77
	Pelayanan Perbendaharaan Gaji	196.946.000,00	177.155.750,00	89,95
	Pengelolaan Kas Daerah	126.131.500,00	122.098.000,00	96,80
5	Pengelolaan Aset Daerah	2.306.113.000,00	1.127.802.950,00	55,39
	Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah	885.958.000,00	449.992.184,00	50,79
	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	667.558.000,00	378.990.235,00	56,77
	Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah	482.572.000,00	298.820.531,00	61,92

1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai koordinator perangkat daerah, proses penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan daerah serta pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selaku koordinator penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergiskan ke satuan arah pandangan dan mekanisme dari Organisasi Perangkat Daerah dalam

pelayanan pengelolaan keuangan. Pada saat ini semakin tinggi tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan termasuk dalam pengelolaan keuangan, perlu di akomodasikan dalam bentuk respon positif melalui pengaturan, pengendalian dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat.

Dengan proses yang teratur, terkendali dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan pelaporan akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, yang pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.

b. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, Visi Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

“ Menjadikan Bojonegoro sumber ekonomi kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing “

2. Misi

Misi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.

3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan rasa aman dan keperpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa.
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
6. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi local.
7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan pencapaian visi misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.

Sasaran 1 : Terwujudnya tertib Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran 2 : Terwujudnya tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Program Perangkat Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP	Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah Program Pengelolaan Anggaran Daerah

				Program Akuntansi dan Investasi Program Pelayanan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Aset Daerah
--	--	--	--	---

d. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Ket
1	Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	
		Layanan Administrasi Keuangan	
		Penyusunan Program dan Laporan	
2	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Perencanaan Anggaran Daerah	
		Pengelolaan Integrasi Data dan Informasi Anggaran Daerah	
		Pengendalian Anggaran Daerah	
3	Program Akuntansi dan Investasi	Akuntansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
		Akuntansi Pengeluaran Kas dan Investasi	
		Akuntansi Penerimaan Kas	

4	Program Pelayanan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Pelayanan Perbendaharaan Non gaji	
		Pelayanan Perbendaharaan Gaji	
		Pengelolaan Kas Daerah	
5	Pengelolaan Aset Daerah	Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah	
		Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	
		Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
		1 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	61,07%	BPKAD	

		5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	60,50%	BPKAD	
4 MANAJEMEN KEUANGAN						
		1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	75,84%	BPKAD	Deviasi = (-24,16%)
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	126,79 %	BPKAD	Deviasi = 26,79%
		3	Aset management	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	BPKAD	
		4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	43,83%	BPKAD	
5 TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK						
		1	Informasi tentang sumber daya yang	Ada	BPKAD	bpkad.bojonegorokab.go.id

			tersedia untuk pelayanan			
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Ada	BPKAD	bpkad.bojonegorokab.go.id
3	PEKERJAAN UMUM					
		6	Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Nihil	BPKAD dan DPKP Cipta Karya	
		7	Jumlah Bangunan gedung Negara milik pemerintah Kabupaten/Kota	4826	BPKAD dan DPKP Cipta Karya	
		8	Jumlah Bangunan gedung Negara milik pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	4826	BPKAD dan DPKP Cipta Karya	



TRANSPARANSI
REKONSTRUKSI ANGGARAN
KABUPATEN BOJONEGORO

ALOKASI DANA DESA

Rekening Sub Rincian Belanja Modal



Rapat Koordinasi terkait Perubahan APBD 2019
Berhubungan dengan proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, maka Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Program dan Laporan atas...

- Rekonsiliasi Keuangan FKTP Tahun 2019**
Kegiatan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan FKTP Fasilitas Kesehatan
- Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik**
Pada tanggal 25 Juni 2019 di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan As...
- Rapat Koordinasi terkait Perubahan APBD 2019**
Berhubungan dengan proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, mak...

Beranda | Selamat datang di BPKAD Bojonegoro

PL KEPALA BPKAD BOJONEGORO



BERITA TERBARU

Rekonsiliasi Keuangan FKTP Tahun 2019
13 Agustus 2019 - 12:38:00 WIB
Kegiatan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tahun 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2019 yang bertempat di Ruang pertemuan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut dibuka oleh K... [readmore](#)

Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahap I Tahun 2019
25 Juli 2019 - 11:24:00 WIB
Pada tanggal 25 Juli 2019 di Ruang Rapat badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dilaksanakan Rekonsiliasi Pengisian Data Kaitok-Data Aplikasi OMSYAN antara BPKAD dengan OPD yang memdangiri Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Rekonsiliasi tersebut bertujuan... [readmore](#)

Rapat Koordinasi terkait Perubahan APBD 2019

PENGUMUMAN

- 29 Juli 2019 - 13:05:54 WIB
Pengumuman Lelang Bangunan Gedung Kantor Perumahan Eks. RSUD Surodoro Dik. Kesoema Bojonegoro
 - 18 September 2018 - 10:42:58 WIB
Pengumuman Lelang
 - 17 November 2017 - 12:02:15 WIB
Nomor Perda dan Perbup APBD-PP 2017
 - 29 April 2018 - 04:18:11 WIB
Nomor Perbup Perubahan (Regenerasi) APBD 2018
 - 10 Januari 2018 - 10:51:09 WIB
Nomor Verda dan Perbup APBD 2018
- [> Lihat Pengumuman](#)

AGENDA



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

Jalan P. Matanajel No.1 Bojonegoro, Telp. (0353) 881289, Ex. Lokal 1023, Fax. (0353) 571113

Keberanda **SDM**

PENGUMUMAN

- 09 Juli 2020 - 13:23:54 WIB
Pengumuman Lelang Kelengkapan Gedung Kantor Pemmanan Eks. RSLU Saradana Djalikoesoemo Bojonegoro
- 18 September 2018 - 15:42:38 WIB
Pengumuman Lelang
- 11 November 2017 - 12:02:15 WIB
Nomor Perda dan Perbup APBD 2017
- 28 April 2016 - 16:18:11 WIB
Nomor Perbup Perubahan (Pergecema) APBD 2016
- 12 Januari 2016 - 10:38:12 WIB
Nomor Perda dan Perbup APBD 2016

[Index Pengumuman](#)

AGENDA

- Belum ada agenda -

STATISTIK PENGUNJUNG

- OS: Windows 7
- Browser: Chrome 88.0.4324.150
- IP Addr: 182.259.239.182
- Online: 43 user
- Hit: 8.593.371 klik
- Dibunjungi sebanyak: 1.733.451 kali



PELAKSANA PELAYANAN PROSES SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

NO	NAMANYA	JABATAN	MASA KERJA	PENDEKSAAN TERAKHIR
1	MURAHARAHMAH, DE, MM NIK 197810282002122010	Replak Kucing Perbencaharaan	16 tahun 6 Bulan	SI
2	YUSWONO MARHATI, SH, MM NIK 19660915 19021 003	Kabidatitabekas Non Spj	23 tahun 4 bulan	SI
3	SULIS YONINGWATI, Sps. NIK 19690411 19690320192	Kasubid Pengurusan Kiv Userah	26 tahun 3 Bulan	SI
4	SRWALUSRIHA NIK 198108262001122000	Staf	12 tahun 6 bulan	SI
5	SUSI HENDRIYANNA NIK 196604202000121007	Staf	16 tahun 6 Bulan	SI
6	HENY SULIS YONING NIK 198112062000012011	Staf	16 tahun 6 Bulan	SI
7	CHUSNI MUMBAROK NIK 198210202000011005	Staf	11 tahun 6 Bulan	SI

PELAKSANA PELAYANAN PENCAIRAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) PPKD

NO	NAMANYA	JABATAN	MASA KERJA	PENDEKSAAN TERAKHIR
1	UTUL HANIK, Ss NIK 197112041990032004	Kasubag Keuangan	21 tahun 3 Bulan	SI
2	HELIDIANA, Ss NIK 196601172010012004	Kasubag Program dan Laporan	17 tahun 9 Bulan	SI



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Jalan P. Mastumapal No.1 Bojonegoro - Telp. (0363) 881259, Ex Local 1023, Fax (0363) 571113

Beranda > Transparansi Anggaran

TRANSPARANSI ANGGARAN

Meaksanakan Antrah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.52/1797/SJ Tanggal 9 Mei 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, maka dibawah ini terdapat tautan dokumen yang terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

2020 ▾ - Pilih Item - ▾

No	Name	Lihat	Download

- Pilih Item -
- Ringkasan RKA SKPD & Ringkasan RKA PPKD
- Pencapaian Perda Tentang APBD
- Perda Tentang APBD
- Rincian Perda APBD
- Ringkasan Penjabaran APBD
- Rincian Penjabaran APBD
- Ringkasan DPA SKPD dan DPA PPKD
- Alokasi Dana Desa (APBD)
- Dana Desa (APBN)
- Alokasi Dana Desa
- Hibah Kepada Masyarakat
- Barifuan Sosial Kepada Masyarakat



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Jalan P. Mastuzmapel No.1 Bojonegoro - Telp. (0353) 881259, Ex Local 1023, Fax. (0353) 571113

Beranda Dokumen Publik

DOKUMEN PUBLIK

2020

Laporan Realisasi COVID-19

No	Name	Lihat	Download
1	Bulan Juni 2020		Download

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantu Pusat

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantu Pusat yang Dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

N o	K/LP NK	Dasar Pelaksa naan Penuga san (TP)	Progra m, Kegiata n, Output dan Rincian Kegiata n	Loka si	SKPD Pelaksan a (TP)	Alok asi Angg aran	Reali sasi Angg aran	%	Reali sasi Capa ian Kiner ja	%	Ke t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIHIL											

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

N o	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaa n Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelak sana (TP)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisa si Capaia n Kinerja	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidik an	Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 903/8215.21/101.1/2019	- BPPDGS - Honorrarium Kinerja Kepala /Guru TK/PAUD Non PNS - Honorarium Kinerja Guru Non PNS	Kabup aten Bojone goro	BPKA D	Rp. 7.302.900 .000,00 Rp. 391.200.0 00,00 Rp. 312.000.0 00,00	Rp. 7.302.900 .000,00 Rp. 391.200.0 00,00 Rp. 312.000.0 00,00	100 100 100	100 100 100	100 100 100	

3.3 Permasalahan dan Kendala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bukan sebagai pelaksana teknis untuk kegiatan yang sumber dananya dari Transfer Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi, meski demikian terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan terkait dana-dana dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya perubahan Alokasi Dana Transfer ataupun Bantuan Keuangan Provinsi setelah ditetapkannya APBD sehingga harus mengakomodir perubahan tersebut dalam pegeseran anggaran atau perubahan APBD;
2. Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau penyaluran bantuan tidak tepat waktu sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan, sehingga menyebabkan penyerapan anggarn menumpuk pada akhir tahun.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan diatas adalah :

1. Menghitung secara cermat alokasi untuk Dana Transfer dan Bantuan Keuangan sehingga tidak terjadi perubahan dalam pelaksanaannya.
2. Segera mungkin menyampaikan informasi apabila ada perubahan alokasi sebelum APBD ditetapkan.
3. Petunjuk teknis dibuat secara universal sehingga dapat digunakan lebih dari satu tahun anggaran.
4. Petunjuk teknis disampaikan ke daerah bersamaan dengan penyampaian alokasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Khususnya pasal 69 dan pasal 70 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. Saran

Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2020 akan dievaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan di Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, 31 Desember 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



LULUK ALIFAH, SE.,MM
Pembina
NIP. 19691128200312 2 008